

30. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BLITAR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Guna mendukung tema Pembangunan tahun 2026 “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”, maka proses penyusunan Renja Bakesbangpol tahun 2026 dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Bakesbangpol tahun 2025, serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renstra Bakesbangpol) Tahun 2025-2029, dan RKPD tahun 2026. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga mengakomodir pada penelaahan usulan kegiatan Masyarakat, hibah, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam pelaksanaan Renja Bakesbangpol dimungkinkan adanya perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan tahap perumusan rancangan dengan mengevaluasi kinerja tahun berjalan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hingga ditetapkan menjadi dokumen perubahan rencana kerja yang berpedoman pada perubahan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Bakesbangpol Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bakesbangpol Kota Blitar;

- 3 Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
- 4 Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025- 2029

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2026.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2026 sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan. |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun Lalu |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar |
| | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar |
| | 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. |
| | 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional |
| | 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. |
| | 3.3 Program dan Kegiatan |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. |

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Blitar tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bakesbangpol Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8					Urusan Pemerintahan Umum									
8	1				Bidang Urusan									
					Kesatuan Bangsa dan Politik									
					Tujuan:	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,25	85,49	84,92	85,6	100,80	84,93	85,80	101,84
					Sasaran:									
					Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase Konflik Sosial Tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,5	87,05	80,3	89,54	111,51	80,4	90,17	112,01
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A		A	A	
							85	85,62	84,98	86,12	101,34	84,99	86,13	101,33
8	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,85	90,03	79-84	92,6	117,22	88.8	92,7	104,33
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100,00
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	12	12.00	12	100	12	36	75

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	20	20.00	20	100	20	40	50
8	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	19	20.00	20	100	22	61	290,48
8	1	1	2.02	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20	5	5	5	100	5	15	75
8	1	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	2	5.00	5	100	4	11	138
8	1	1	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21	19	20	20	100	22	61	290
8	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	3	300
8	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3	3	3	100	4	10	83

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
										Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	2	3	3	100	4	9	113
8	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	12	2	2	100	4	18	38
8	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	1	2	2	100	1	4	100
8	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	24	24.00	24	100	24	72	75
8	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	51	41.00	56	136,59	40	147	89
8	1	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	1.00	1	100	1	2	200
8	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.07	5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27	13	77.00	77	100	2	92	341
8	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	13	36.00	36	100	2	51	510
8	1	1	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2					1	1	50
8	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	36	36.00	36	100	36	108	75
8	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52	13	13.00	13	100	13	39	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						yang Disediakan								
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	10	11.00	11	100	4	25	147
8	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26	0	8.00	8	100	8	16	62
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158	69	85.00	85	100	50	204	129
8	1	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yangDipelihara	3					1	1	33
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	2.00	2	100	2	6	100
8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase kampung berkarakter Pancasila	47,6	4,75	9,5	19,05	200,53	14,3	57,14	120
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	87	83	100	120,48	84	95	112
						Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	10	1	2	4	200	3	12	120
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000	100	300.00	300	100	150	550	55

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	2	2.01	5		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	3	3.00	3	100	3	9	75
8	1	2	2.01	6		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	900	100	400.00	400	100	300	800	89
8	1	2	2.01	7		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka						1	1	100
8	1	2	2.01	8		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka						78	78	100
8	1	2	2.01	9		Pembinaan Lanjutan kepada	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						1	1	100
8	1	2	2.01	10		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						1	1	100
8	1	2	2.01	11		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila						78	78	100
8	1	3				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	85	85	83	90	108,43	84	95	112
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500	500	500	875	175,00	200	1575	105
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700	100	200.00	200	100	300	600	86

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38	11	11.00	11	100	8	30	79
8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80	87,05	72	89,53	124,35	75	89,10	111
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	123	151	121	137	113,22	122	139	113
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750	150	200	270	135,00	250	670	89
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	80	80	78	80	102,56	79	85	106
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	95	89	90	90	100	93	95	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1150	250	300	300	100	200	750	65
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	1	1	1	100	1	3	75
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7240	1810	2725	4785	175,60	2040	8635	119

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11	2	3	3	100,00	3	8	73
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100,00	1	3	75

Dari tabel Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025 diatas Untuk:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebagian sudah mencapai dan melebihi target kinerja yang direncanakan, untuk beberapa sub kegiatan ada yang belum mencapai target kinerja.
Faktor penyebab tercapai dan bahkan melebihi target kinerja hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan rutin.
Faktor tidak tercapainya target kinerja pada beberapa sub kegiatan, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran dan masih dilaksanakan sampai dengan tribulan II.
Implikasi dari terpenuhi dan bahkan melebihi target kinerja adalah tercapainya target akhir Renstra sesuai perencanaan dan terpenuhinay semua kebutuhan rutin OPD.
Implikasi tidak tercapainya target kinerja adalah tidaj tercapainya target akhir periode Renstra PD dan adanya beberapa kebutuhan OPD yang belum teprpenuhi.
Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil adalah dengan mengurangi target karena harus disesuaikan dengan besaran pagu anggaran.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta semua sub kegiatannya mencapai target kinerja
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan, dan koordinasi dengan pihak-pihat terkait.
Untuk target kampung Pancasila pada tahun 2025 akan mencapai 12 kampung dari 21 kampung.
Implikasi dari pencapaian kinerja dari program ini menunjukkan kesuksesan pelaksanaan kegiatan.
Implikasi dari pembentukan kampung Pancasila perlu adanya pembinaan sehingga bisa meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pnacasila pada kehidupan sehari-hari di Masyarakat.
Kebijakan untuk Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah dengan memberikan pendampingan kepada kampung-kampung Pancasila agar nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Masyarakat.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sudah mencapai target.
Hanya 1 (satu) sub kegiata yang belum mencapai target kinerja yaitu sub koordinasi dan monitoring.
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja karena selain Bakesbang pihak partai politik penerima hibah juga melaksanakan Pendidikan politik kepada kader dan Masyarakat.
Faktor tidak tercapainya target kinerja pada sub koordinasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Untuk sub monitoring dikarenakan Lembaga penerima hibah akan bertambah dan berkurang menyesuaikan tahun pemilu.
Implikasi pencapaian target kinerja akan berdampak meningkatkanya pemahaman Masyarakat terhadap Pendidikan politik.

Implikasi tidak tercapainya target kinerja adalah belum optimalnya pemahaman Masyarakat tentang politik.

Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat dengan meminta laporan secara rutin dan berkala dari partai-partai penerima hibah perihal pelaksanaan pemberian Pendidikan politik kepada para kadernya.

Memperluas pemberian Pendidikan politik kepada Masyarakat yang sudah memasuki usia pemilih.

3. Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melebihi target kinerja dimana jumlah ormas yang aktif melebihi target yang direncanakan

Faktor penyebab melebihinya target kinerja dikarenakan keaktifan ormas menghadiri undangan dari Bakesbangpol, aktif melaporkan keberadaan dan kegiatannya, melaporkan perubahan pengurusnya.

Untuk semua sub kegiatannya mencapai target kinerja.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja karena peran aktif OPD dalam melakukan monitoring keaktifan ormas baik dengan mendatangi langsung ke kantor sekretariat ormas maupun memonev hasil pengisian aplikasi e-landa.

Implikasi tercapainya target kinerja ini akan memberikan data tentang jumlah ormas aktif yang sudah terdaftar di Bakesbangpol.

Kebijakan yang perlu diambil untuk terus meningkatkan keaktifan ormas dengan terus menghimbau ormas untuk aktif menggunakan aplikasi e-landa.

Menyarankan ormas yang belum berbadan hukum untuk melakukan pengurusan menjadi ormas yang berbadan hukum.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Untuk semua sub kegiatannya mencapai target kinerja

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan, anggaran dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Implikasi tercapainya target kinerja ini adalah bisa meningkatkan pemahaman masyarakat akan dampak berbahaya dari miras dan narkoba.

Kebijakan yang perlu diambil adalah mempunyai data tersendiri tentang daerah zona merah atau zona rawan miras dan narkoba dengan mengaktifkan kinerja tim P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Untuk Sub Kegiatan koordinasi bisa melebihi target karena bersifat tentatif menyesuaikan giat pengamanan wilayah

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja karena koordinasi dengan jajaran samping termasuk instansi vertikal

Implikasi dari tercapainya target kinerja ini adalah terdeteksinya dan segera terselesaikannya potensi konflik sosial di Masyarakat lebih dini.

Kebijakan yang perlu diambil adalah meningkatkan peran FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) guna memperoleh kecepatan informasi potensi konflik sosial yang dimungkinkan akan muncul.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tidak memiliki IKK dan SPM, sedangkan untuk IKU diambil dari Sasaran OPD. Berikut akan ditampilkan Tujuan dan Sasaran Target Renstra dan Realisasi Capaian dari tahun 2022 sampai dengan 2025 serta proyeksi target tahun 2026 dan 2027.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IK K/SPM	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Tujuan	84,90	84,91	84,92	84,93	85,15	85,49	85,60*	85,80*			Untuk penghitungan nilai IKUB tahun N akan dihitung pada tahun N+1
2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tujuan									88,69	88,70	Untuk penghitungan nilai IDI tahun N akan dihitung pada tahun N+1
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Sasaran (IKU)									85,64	85,71	Pada Renstra 2025-2029 IKUB menjadi Sasaran OPD
	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Sasaran (IKU)									60	62	Indikator sasaran pada Renstra 2025-2026
	Aspek kapasitas lembaga demokrasi	Sasaran (IKU)									90	90,20	Indikator sasaran pada Renstra 2025-2026
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran (IKU)									90,01	90,02	Indikator sasaran pada Renstra 2025-2026
4	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Sasaran (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	Sasaran (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Sasaran (IKU)	80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	69,77%	87,05%	89,54%	90,17%			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sasaran (IKU)	A (84,96)	A (84,97)	A (84,98)	A (84,99)	A (85,54)	A (85,62)	A (86,12)	A (86,13)			

Indikator Tujuan dan Sasaran semua telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, kecuali indikator sasaran tahun 2022 Persentase Ormas dan Orpol yang aktif tidak mencapai target karena banyaknya ormas yang pasif tidak melaporkan keberdaannya, kegiatannya, dan tidak melapor ketika bubar.

Perubahan yang ada pada Renstra 2025-2029:

1. IDI dari indikator tujuan Kota menjadi indikator tujuan OPD.
2. IKUB berpindah dari Indikator tujuan menjadi indikator sasaran
3. Indikator Persentase Kejadian SARA Tertangani, Persentase Ormas dan Orpol yang aktif, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah tidak menjadi indikator sasaran OPD.
4. Terdapat Indikator baru untuk sasaran tahun 2026 yaitu Indeks Kinerja Ormas (IKO), Aspek kapasitas lembaga demokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Faktor penyebab tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran hal ini dikarenakan Kerjasama dan koordinasi aktif dengan instansi terkait. .

Implikasi tercapainya kinerja memberikan dampak positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan tercapainya target akhir Renstra 2025 sehingga menjadi dasar kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk Renstra 2025-2029.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar memberikan beberapa pelayanan kepada masyarakat berupa mencatat ormas yang mendaftar ke Bakesbangpol, fasilitasi hibah kepada Lembaga mitra OPD, pemberian surat bebas narkoba, rekomendasi ijin penelitian, magang, KKN, PPL. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, maka diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan public terhadap layanan yang diberikan. Hasil survei tahun 2025 semester I menunjukkan angka 91,88 yang mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal kritis yang terkait dengan pelayanan adalah belum adanya ruang khusus untuk pelayanan.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
 - a. Struktur Organisasi Bakesbangpol yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Mekanisme kerja Bakesbangpol yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
 - c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Bakesbangpol, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
 - d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
 - e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan di Bakesbangpol.
- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2026 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Keterlambatan laporan potensi kejadian SARA dan konflik social yang diterima;
2. Tidak adanya kewajiban ormas mendaftarkan keberadaannya kepada Bakesbangpol;
3. Pemberian layanan rekomendasi kepada masyarakat kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
4. Belum optimalnya pendampingan kepada masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS. Pada tahun 2026 tema Pembangunan Daerah adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”, dengan prioritas Kota Blitar:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif
2. Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dari ke lima prioritas tersebut di atas, Bakesbangpol mendukung prioritas kota “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

Terkait dengan tema tersebut, Bakesbangpol yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberian layanan kepada Masyarakat dengan cara yang mudah dan cepat dengan memanfaatkan aplikasi e-landa,

meningkatkan kompetensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana berupa ruang khusus pelayanan yang standart.

Renja Bakesbangpol berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Bakesbangpol Kota Blitar.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bakesbangpol				6.986.424.907,00	Bakesbangpol				7.822.439.759,00	
	Sasaran:					Sasaran:					
	Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,01		Meningkatnya Kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,01		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar				
	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	4.375.176.304,00	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	4.374.754.396,00	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standa	100%	19.597.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standa	100%	19.597.900,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.723.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.723.200,00	
2	Evaluasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	17 Laporan	3.187.500,00	Evaluasi Kinerja		Jumlah Laporan Evaluasi	17 Laporan	3.187.500,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Kinerja Perangkat Daerah			
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.100.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.100.000,00	
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.100.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.100.000,00	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen	3.187.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen	3.187.200,00	
6	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	3.300.000,00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	3.300.000,00	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.515.505.871,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.515.505.871,00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.514.005.871,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.514.005.871,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	5 Laporan	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	5 Laporan	1.500.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	3.300.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	3.300.000,00	
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.300.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.300.000,00	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	143.157.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	143.157.800,00	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	57.335.600,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	57.335.600,00	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	85.822.200,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	85.822.200,00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	203.971.933,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	203.550.025,00	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.719.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	7.719.700,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.388.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	26.388.600,00	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.946.200,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5.946.200,00	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.393.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	21.393.800,00	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.529.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	10.529.000,00	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.956.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	7.956.000,00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	120.758.633,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	120.336.725,00	
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.280.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	3.280.000	
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	67.015.900,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	67.015.900,00	
20	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	26.969.500,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	26.969.500,00	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	40.046.400,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	40.046.400,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	277.221.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	277.221.600,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.248.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.248.800,00	
1.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	232.972.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	232.972.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	145.405.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	145.405.300,00	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.475.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	42.475.500,00	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.324.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	28.324.200,00	
25	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	8 unit	6.120.000,00	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	2 unit	6.120.000,00	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	28.485.600,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	28.485.600,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	40.000.000,00	
	Tujuan :		Indikator Tujuan :			Tujuan :		Indikator Tujuan :			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,40		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,40		
	Sasaran:		Indikator Sasaran:			Sasaran:		Indikator Sasaran:			
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,64		Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,64		
			Persentase konflik sosial tertangani	100%				Persentase konflik sosial tertangani	100%		
	Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol		Indeks Kinerja Ormas (IKO)	60		Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol		Indeks Kinerja Ormas (IKO)	60		
			Aspek kapasitas lembaga demokrasi	90				Aspek kapasitas lembaga demokrasi	90		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	66,67	1.035.000.000,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	66,67	1.035.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	2	1.035.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	2	1.035.000.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	100.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2	75.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2	75.000.000,00	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200	60.000.000,00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	200	60.000.000,00	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	3	13.750.000,00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan	3	13.750.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Purnapaskibraka					Purnapaskibraka			
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	110	786.250.000,00	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	110	786.250.000,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	85	680.621.708,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	85	680.621.708,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	83	680.621.708,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	83	680.621.708,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	150	60.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	400	60.000.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	620.621.708,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9	620.621.708,00	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	90	113.800.000,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	90	113.800.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Masyarakat Yang berbadan hukum	71	113.800.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Masyarakat Yang berbadan hukum	71	113.800.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	150	38.800.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	150	38.800.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	75.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	75.000.000,00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	475.000.000,00	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100%	475.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80%	475.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80%	475.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	200	75.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	200	75.000.000,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5	400.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5	400.000.000,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	306.826.895,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	1.143.263.655,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi	100%	306.826.895,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi	100%	1.143.263.655,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	2250	123.293.700,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	2250	123.293.700,00	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	153.563.240,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	990.000.000,00	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	29.969.955,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	29.969.955,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Rancangan awal RKPD dan Rancangan Akhir RKPD tidak banyak perubahan hanya beberapa saja yaitu:

1. Total pagu OPD pada ranwal RKPD Rp. 6.986.424.907,00, pada Rankir RKPD menjadi Rp. 7.822.439.759,00, hal ini dikarenakan adanya tambahan dana hibah.
2. Total pagu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Ranwal RKPD sebesar Rp. 203.971.933,00, pada Rankir RKPD berkurang menjadi Rp. 203.550.025,00. Perubahan ini ada pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dimana pada Ranwal RKPD sebesar Rp. 120.758.633,00, pada Rankir RKPD berkurang menjadi Rp. 120.336.725,00, hal ini disebabkan adanya pos lain yang membutuhkan anggaran.
3. Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdapat perubahan pagu, untuk pagu Ranwal RKPD Rp. 306.826.895,00, pada Rankir RKPD bertambah menjadi Rp. 1.143.263.655,00. Perubahan ini terjadi pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Dimana pagu Ranwal RKPD Rp. 153.563.240,00 berubah menjadi Rp. 990.000.000,00. Hal ini diperuntukan mencukupi hibah TNI dan POLRI.
4. Ada juga perubahan target dari Ranwal RKPD menjadi Rankir RKPD diantaranya pada sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dari target 150 orang menjadi 400 orang, hal ini dikarenakan penghapusan 1 sub kegiatan.
 - e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dari target 5 laporan menjadi 4 laporan yang terdiri dari laporan pemantauan pelaksanaan ekosobud, fasilitasi hibah lembaga Badan Narkotika Kota (BNK). fasilitasi hibah FKUB dan IKUB

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Blitar untuk Baksbangpol diperoleh dari hibah dimana untuk tahun 2026 ada 13 (tiga belas) Lembaga penerima hibah terdiri dari:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
2. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3. Badan Narkotika Kota (BNK)
4. Partai Golkar
5. Partai Gerindra
6. Partai Demokrat
7. Partai PDI
8. Partai PPP
9. Partai PKB
10. Partai PAN
11. Polres

12. Kodim 0808

13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Usulan hibah ini sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol yaitu isu keagamaan, SARA, politik, ormas, kondusifitas wilayah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 lembaga	Diakomodir
2	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	FPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	1 lembaga	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
		Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa		Sejarah Bangsa		
3	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	BNK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
4		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	GOLKAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
5			GERINDRA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
6			DEMOKRAT	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
7			PDIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
8			PPP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
9			PKB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 parpol	Diakomodir
10			PAN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1 parpol	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
11		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	POLRESTA BLITAR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir
12			KODIM 0808	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	1 lembaga	Diakomodir

No	Usulan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
				Penanganan Konflik di Daerah		
13	(UNTUK HIBAH) Perlunya fasilitasi kegiatan Forkopimda		FKDM	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lembaga	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan nasional tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Prioritas Nasional RKP tahun 2026 adalah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan system Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional RKP tahun 2026, Bakesbangpol mendukung Prioritas Nasional nomor 1 (satu) "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia".

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2026 yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, berfokus pada transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan

- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan kelompok Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Blitar
Tahun 2026-2027

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Metode IDI terbaru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator. Tiga aspek yang dimaksud terdiri atas aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun N-1	84,37	88,68	84,40	84,65	
2	Sasaran:								
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar dengan fokus pada empat dimensi pengukuran Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama, dan Peran Pemerintah Daerah.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun N-1	85,60	85,80	85,64	85,71	IKU
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Ruang lingkup Penganan konflik sosial: 1. Pencegahan konflik 2. penghentian konflik 3. pemulihan pascakonflik	Jumlah konflik sosial yg ditangani : jumlah konflik sosial yang terjadi x 100%	100%	100%	100%	100%	IKU
	Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks Kinerja Ormas (IKO) dihitung berdasarkan ormas yang terdaftar, berbadan hukum, aktif melaporkan keberadaan dan kegiatannya secara rutin ke Bakesbangpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO) pada tahun N			60	62	IKU
		Aspek kapasitas lembaga	Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada kekuatan dan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses demokrasi, seperti lembaga	Aspek kapasitas lembaga demokrasi pada			90	90,20	IKU

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		Ket
					2024	2025	2026	2027	
		demokrasi	legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga pendukung lain seperti badan pemilu, pengadilan, dan lembaga penegak hukum	tahun N-1					
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	92,25	90	90,01	90,02	

Tabel 3.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan				
Misi 1 : Mewujudkan Blitar Kota Pancasila Yang Aman, Religiusn dan Nasionalis				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	1. Peningkatan fasilitasi penyelesaian potensi konflik SARA	1. Mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			2. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelesaian potensi koflik SARA	
		2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku positif warga Masyarakat	
			2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui pembentukan kampung pancasila	
			3. Pembinaan paskibraka dan Purnapaskibraka	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			4. Peningkatan pendidikan karakter anti narkoba di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat	
		3. Penguatan deteksi dini munculnya potensi konflik sosial	1. Mengoptimalkan forum-forum kewaspadaan dini di tingkat daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			2. Menggalakkan dialog dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang berkembang	
			3. Memanfaatkan data dan teknologi informasi untuk pemetaan potensi konflik social	

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan				
Misi 1 : Mewujudkan Blitar Kota Pancasila Yang Aman, Religiusn dan Nasionalis				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol	4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Peningkatan etika budaya politik melalui Pendidikan politik bagi masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			2. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	
		5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peningkatan kesadaran hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	1. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
		N	I	H	I	L	

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka pada Renstra baru periode 2025-2029, untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi indikator Tujuan Bakesbangpol sedang untuk Sasaran ada 3 (tiga) indikator baru yaitu Indeks Kinerja Ormas (IKO), Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan Program, kegiatan, dan sub kegiatan selain melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 juga melaksanakan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada tahun 2026 Bakesbangpol memiliki 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 6.986.424.907,00 seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar
Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Mendukung Prioritas Nasional : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Mendukung Prioritas Kota: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Mendukung tusi
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
8.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
8.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Konsultasi SKPD		
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Mendukung tusi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Mendukung tusi
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Mendukung tusi
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Mendukung tusi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
		Daerah yang Dilaksanakan	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Mendukung tusi
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja (Renja) dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Bakesbangpol Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2024 pada Renja Bakesbangpol Tahun 2026

Tabel 4.1
Rencana Tindaklanjut LKJIP Bakesbangpol Tahun 2024
pada Renja Bakesbangpol Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama c. Mengoptimalkan peran FPK Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan sebagai wadah komunikasi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan d. Meningkatkan interaksi antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan guna menumbuhkan sikap inklusif (terbuka) antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang diharapkan akan diikuti oleh masing-masing anggota komunitas	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / Stake holder dalam penanganan konflik; c. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial d. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; e. Optimalisasi peran media massa f. Penguatan kewaspadaan dini Masyarakat g. Penguatan peran FKDM tingkat kecamatan/kota dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan/Kota	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas dan Orpol	a. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		secretariat/keberadaannya. b. Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas c. Diadakan kegiatan yang melibatkan Orpol yang ada di Kota Blitar	Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Memberantas penyakit sosial masyarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah b. Melaksanakan review perencanaan dengan monev berjenjang c. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim SAKIP dalam penyusunan dokumen d. Menyusun Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah. e. Menyusun Laporan Hasil monitoring Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah TW 3. f. Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun g. Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. h. Mengoptimalkan sosialisasi hasil pengukuran kinerja agar untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/satuan kerja. i. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai. j. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bakesbangpol

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027 adalah sebagaimana tabel berikut :

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17	3.187.500,00			20	3.271.620,00
8	0	0	2	0	00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	2.100.000,00			1	2.772.660,00
8	0	0	2	0	00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	5.100.000,00			1	5.100.000,00
8	0	0	2	0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		12	3.187.200,00			10	3.435.201,00
8	0	0	2	0	00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan								
						Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1	3.300.000,00			1	3.300.000,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan								
8	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
						Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100	3.515.505.871,00			100	3.532.320.961,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	3.514.005.871,00			26	3.530.647.207,00
8	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
					07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5	1.500.000,00			5	1.673.754,00
8	0	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
					3	Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		100	3.300.000,00			100	3.300.000,00
8	0	0	2	0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
					06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	3.300.000,00			1	3.300.000,00
8	0	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
					5	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai		100	143.157.800,00			100	155.017.218,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	21.393.800,00			4	25.470.800,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	10.529.000,00			1	11.598.107,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24	7.956.000,00			24	8.000.000,00
8	0	0	2	0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40	120.336.725,00			40	121.000.000,00
8	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	3.280.000,00			1	3.444.336,00
8	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
						Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100	67.015.900,00			100	35.000.000,00
8	0	0	2	0	00	Pengadaan Mebel								
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4	26.969.500,00			4	0
8	0	0	2	0	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1		7	06	Lainnya								
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	40.046.400,00			4	35.000.000,00
8	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	1		8		Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100	277.221.600,00			100	285.949.031,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	1	1		8	02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	44.248.800,00			36	48.813.188,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	1	1		8	04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13	232.972.800,00			13	237.135.843,00
8	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	1		9		Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100	145.405.300,00			100	182.170.027,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	1	1		9	01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	42.475.500,00			1	72.415.155,00
8	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan								

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Karakter Kebangsaan								
							Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila		2	1.035.000.000,00			2	1.214.707.555,00
8	0	0	2	0	00	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		200	100.000.000,00			200	89.255.820,00
8	0	0	2	0	00	05	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2	75.000.000,00			2	
8	0	0	2	0	00	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masvarakat akan Pentingnva								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
						Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		200	60.000.000,00			200	43.443.020,00
8	0	0	2	0	00	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
						Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		3	13.750.000,00			3	17.185.660,00
8	0	0	2	0	00	Pembentukan Paskibraka								
						Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka		110	786.250.000,00			110	1.064.823.055,00
8	0	0				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
						Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		85	680.621.708,00			86	690.425.110,00
8	0	0	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan								

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
							Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan politik pada masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		83	680.621.708,00			85	690.425.110,00
8	01	03	2	01	00	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
							Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		400	60.000.000,00			500	65.100.310,00
8	01	03	2	01	00	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		9	620.621.708,00			9	625.324.800,00
8	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
						Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		90	113.800.000,00			90,1	119.637.851,00
8	0	0	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
						Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		71	113.800.000,00			73	119.637.851,00
8	0	0	2	01	00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,		150	38.800.000,00			100	44.637.851,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
8	0	0	2	01	00	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1	75.000.000,00			2	75.000.000,00
8	0	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
						Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		100	475.000.000,00			100	464.063.403,00
8	0	0	2	01		8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
						Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan		80	475.000.000,00			84	464.063.403,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						budaya	budaya							
8	0	0	2	01	00	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		200	75.000.000,00			200	64.063.403,00
8	0	0	2	01	00	05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		5	400.000.000,00			5	400.000.000,00
8	0	0				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN								

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KONFLIK SOSIAL								
						Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100	1.143.263.655,00			100	790.965.751,00
8	0	0	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								
						Meningkatnya deteksi dini munculnya potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terdeteksi		100	1.143.263.655,00			100	790.965.751,00
8	0	0	2	01	00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2250	123.293.700,00			3003	527.152.511,00
8	0	0	2	01	00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta								

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Klnerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penanganan Konflik di Daerah								
							Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4	990.000.000,00			4	153.563.240,00
8	0	0	2	01	00	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
							Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	29.969.955,00			1	110.250.000,00

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan Meningkatkan Koordinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
2. Meningkatkan pemahaman Masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan kampung Pancasila dan sosialisasi wawasan kebangsaan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
4. Meningkatkan pemberian Pendidikan politik masyarakat
5. Meningkatkan keaktifan Ormas dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Renja Tahun 2026 memuat usulan rencana kegiatan prioritas urusan pemerintahan umum. Dalam pelaksanaan Renja terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dicapai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai juga.
- 2) Ketersediaan anggaran, namun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar program prioritas/unggulan tetap dapat dilaksanakan.

Agar target kinerja dan sasaran dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2026 dapat dicapai maka perlu kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu:

1. Dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu.
2. Fokus pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
3. Tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra).
5. Capaian pelaksanaan kegiatan dalam Renja akan dijadikan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut setelah penetapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2026 adalah:

1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam aplikasi SIRUP.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana kelompok sasaran yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Menyusun kebutuhan administrasi kegiatan.